

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) adalah konvensi perdagangan internasional yang telah diratifikasi dan diadopsi oleh Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil hiu sekaligus penangkapan hiu. Setiap bagian hiu ini memiliki nilai tinggi di pasar global sehingga para nelayan terus melakukan tangkapan tanpa mengetahui dampak buruk bagi populasi hiu tersebut. Hiu martil dan sutra adalah dua jenis hiu yang dengan mudah dapat ditangkap oleh para nelayan karena posisi mereka yang berada pada kedalaman setara dengan ikan tuna maupun ikan-ikan lainnya.

Rata-rata para nelayan mendapat kedua jenis hiu ini sebagai hasil tangkapan secara tidak sengaja sehingga jika mendapati hiu, mereka akan turut menjualnya demi mendapat keuntungan. Pemerintah juga melakukan kerjasama dengan beberapa pihak untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat nelayan terkait perlindungan kedua jenis hiu ini. Namun, tetap saja angka tangkapan hiu terkhusus kedua jenis ini masih cukup tinggi dan menggambarkan bahwa implementasi aturan CITES oleh Indonesia mengalami beberapa hambatan.

Melalui indikator kegagalan negara mematuhi sebuah rezim dari Abram Charles dan Chayes yaitu *lack of capacity*, *temporal dimension*, dan *ambiguity*. CITES yang sudah memiliki celah di beberapa kalimat dalam pasalnya berpotensi membuat negara anggota melakukan interpretasi kurang tepat terhadap aturan

nasionalnya. Termasuk Indonesia yang menerbitkan regulasi nasional sebagai bentuk keseriusan mereka. Regulasi nasional yang masih bersifat ambigu dan tidak memiliki transparansi yang mudah diakses oleh berbagai pihak merupakan permasalahan yang menjadi penghambat implementasi ini dengan baik.

Hambatan seterusnya dapat berasal dari masyarakat sebuah negara. Terpenuhinya indikator *lack of capacity* yang mendorong kegagalan Indonesia melakukan implementasi CITES mengenai perdagangan hiu martil dan sutra. Lingkungan sosial pada masyarakat nelayan yang masih tidak sadar akan kepentingan menjaga populasi hidupan bawah laut terkhusus hiu masih rendah, pendidikan yang minim akan, serta kondisi ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada hasil tangkapan. Sumber pendapatan yang tinggi didapatkan oleh mereka melalui tangkapan hiu tersebut. Hal tersebut mendorong keinginan mereka untuk menangkap hiu karena hasil yang cukup menguntungkan bagi mereka.

Peneliti menilai hambatan yang dialami oleh Indonesia untuk mengimplementasikan aturan CITES terkait perdagangan hiu martil dan sutra ini lebih cenderung karena adanya *lack of capacity* dan *ambiguity*. Upaya yang telah dilakukan mengalami berbagai hambatan dari berbagai macam aspek mulai dari ambigunya aturan CITES secara global hingga domestik dan keterbatasan kapasitas pemerintah. Dapat disimpulkan bahwa indikator *lack of capacity* dan *ambiguity* menjadi penghambat terbesar Indonesia dalam mengimplementasikan CITES terkait perlindungan hiu martil dan sutra di nasional.

5.2 Saran

Setelah mengetahui jawaban atas pertanyaan penelitian terkait hambatan implementasi CITES oleh Indonesia terhadap perdagangan hiu martil dan sutra,

peneliti dapat menyarankan beberapa usulan yang dapat membantu peneliti selanjutnya meneliti terkait hambatan yang dialami oleh Indonesia untuk implementasi CITES ini. Pertama, peneliti harus dapat mencari informasi terkait data-data dari berbagai sumber karena data yang disajikan masih kurang *update* dari tahun ke tahun sehingga memerlukan pengolahan data secara terpisah. Kedua, peneliti selanjutnya harus meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan hiu-hiu ini meskipun masih berada di Apendiks II. Tingkat populasi hiu yang dapat menjadi satwa terancam akan tetap mengkhawatirkan jika kebijakan yang dikeluarkan tidak mengalami perubahan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah tidak dilakukan tanpa adanya penyesuaian dengan kondisi terbaru dengan kemajuan sebuah teknologi.

